

(044/SKP/01/1.5.)

"PAPUA, KO MAU KEMANAKAH?"

Jika mengikuti perbincangan masyarakat Papua di berbagai tingkatan, bahan diskusi itu menyangkut rencana pelaksanaan otonomi khusus di Papua. Di tingkat pemda Tk. I telah dibentuk panitia untuk menangani hal ini. Sementara di tataran masyarakat, tetap berkembang pandangan "Kalau terima otonomi, berarti kitorang tidak merdeka". Sementara itu ruang dialog dengan pemerintah mengenai aspirasi M makin sempit. DPR RI dan MPR-RI yang seharusnya menjadi tempat bicara permasalahan M ternyata tidak memberikan peluang sedikitpun kepada masyarakat Papua untuk bicara. Juga di saat masyarakat Papua mengalami peristiwa-peristiwa pahit seperti akhir-akhir ini di Wamena, Jayapura dan Merauke, saat orang merasa perlu mengungsi, DPR dan MPR tidak buat sesuatu.

SKP coba menyimak perkembangan situasi sosio-politis dewasa ini dengan meninjau sejumlah unsur : 1) Masa lalu tetap membayang : unsur ingatan penderitaan belum dicarikan jalan keluar, 2) Kebijakan "menebar dan menarik jala", 3) unsur otonomi khusus yang de facto sedang dirancang oleh pemda dengan melibatkan segenap lapisan kepentingan masyarakat, 4) "Papua, ko mau kemanakah?"

1. Masa lalu tetap membayang

Bagaimanapun juga peta situasi sosio-politis di Papua tetap diwarnai secara kental oleh sejarah masa lalu yang oleh SKP biasa diberi nama "memoria passionis" (ingatan penderitaan). Ingatan ini menyangkut sejarahnya sebagai bangsa, menyangkut pengalaman bahwa tidak diakui jati dirinya, pengalaman bahwa dikecilkan sampai ditindak, dibunuh semena-mena. Kompleks pengalaman itu belum juga mendapatkan jalan keluar yang memadai dalam arti mendapatkan ruang dalam mekanisme demokratis yang menjamin hak bicara orang Papua. Proses pengungkapan pengalaman selama ini pada akhirnya belum bermuara pada sebuah perundingan antara semua pihak yang berkepentingan, yang memiliki bobot kewibawaan di mata hukum, dan yang mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Secara hukum DPR dan MPR-RI lah yang seharusnya membahas masalah kenegaraan ini tetapi senyatanya tidak ada ruang dialog yang dibuka oleh para wakil rakyat tersebut. Karenanya, rakyat sendiri mencari jalan untuk menyalurkan isi hatinya, nyanyian bisunya, dan harapannya melalui mekanisme kerakyatan seperti pendirian posko Satgas, pengibaran bendera Papua, pemakaian simbol-simbol jatidiri Papua. Tetapi langkah ini kembali disalahpahami dan ditindak secara keras oleh pihak kepolisian dan militer atas instruksi lembaga-lembaga kenegaraan tertinggi di republik ini.

2. Kebijakan "menebar dan menarik jala"

Gaya penanganan pemerintah sejak 1998 hingga 2000 boleh disebut kebijakan menebar jala. Mula-mula segala ungkapan hati, kejengkelan, demo-demo, reaksi anti militer/ polisi, teriakan M(erdeka) dibiarkan tanpa ada pelarangan apalagi penangkapan. Seluruh lapisan masyarakat Papua seakan-akan (sekali lagi SEAKAN-AKAN!!) mendapat ruang hidup seluas-luasnya. Tim 100 boleh bertemu dengan Presiden BJ. Habibie. Boleh

diadakan Mubes dan Kongres. Boleh dikibarkan bendera Papua dan dinyanyikan lagu "Hai, Tanahku Papua". Boleh didirikan Satgas Papua berikut posko-poskonya. Jala ditebarkan dalam-dalam hingga akhirnya ikan masuk dan jala ditarik. Inilah yang terjadi dengan instruksi penurunan bendera Papua tgl. 29 September 2000 dari Kapolri yang menjadi gebrakan awal untuk melakukan langkah represi luar biasa.

Terhadap gerakan massa, represi bersifat telengas karena begitu mudah masyarakat dianiaya, ditangkap, disiksa, dan ditembak mati sedangkan pemimpin-pemimpin rakyat ditahan. Represi ini mendatangkan dampak yang tidak sederhana: [1] kekerasan antar kelompok masyarakat seperti telah terbukti di Wamena (6 Oktober), Merauke (2 Desember); [2] pengungsian baik warga Papua maupun non-Papua; [3] ketakutan yang bersifat sistemik di tingkat masyarakat; [4] kecurigaan antar berbagai kelompok dalam masyarakat; [5] kebingungan karena kehilangan kepemimpinan; [6] makin menipisnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah di segala tingkat. Nada dasar dari semua ini adalah diciptakannya suasana konflik dan kekerasan yang pelan-pelan diidentikkan sebagai ciri perjuangan orang Papua.

Semua tindakan ini sangat tidak proporsional mengingat bahwa seluruh perjuangan rakyat Papua dijalankan secara damai; maka sangat sinis bahwa aparat negara hanya tahu menjawab dengan menahan "tokoh-tokoh perjuangan damai", dan hanya tahu turut mengubah suatu iklim damai menjadi suatu iklim kekerasan.

Dalam situasi seperti itulah pemerintah daerah Tk. I Papua coba kembangkan sistem pemerintahan otonomi khusus.

3. Menimbang RUU otonomi khusus

Agar kita dapat memahami otonomi khusus secara cermat, ada tiga lapis dalam problem otonomi khusus yang perlu dipisahkan secara tajam: 1) lapisan hukum, 2) lapisan isi, dan 3) lapisan psikologi massa.

Yang dimaksudkan dengan lapis hukum adalah bahwa UU No. 22 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan adalah perangkat hukum administratif pemerintahan untuk mengatur cara kerja pemerintah dalam melayani kebutuhan masyarakat, mulai berlaku tgl. 1 Januari 2001 untuk seluruh Indonesia. Dengan sistem otonomi terjadi pelimpahan sebagian besar kekuasaan negara kepada pemerintah daerah. Walau berlaku umum, kepada Aceh dan Papua masih diberikan ruang untuk sendiri turut mengisi secara khusus kerangka otonomi ini.

Kalau dilihat dari lapisan isi, untuk merumuskan isi otonomi khusus ini Pemerintah memberikan batas wewenang, karena sejumlah bidang tetap mau diatur oleh pemerintah pusat sendiri, ialah hubungan luar negeri, fiskal, moniter, pertahanan dan hukum. Kepentingan diluar bidang-bidang itu diserahkan untuk diisi oleh Pemerintah Daerah. Pemda Tk. I Papua mencoba untuk betul merebut kesempatan ini dengan mengisi pokok-pokok terpenting yang menyambung aspirasi masyarakat Papua yang telah berkembang selama 2 tahun terakhir ini. Yang diungkapkan oleh rakyat, yang diberkehendaki oleh rakyat, adalah::

* Pelurusan sejarah

* Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM

- * Sistem perwakilan rakyat yang berakar pada budaya setempat, representatif, bersih dari KKN
- * Sistem pelayanan umum yang lebih efektif : kesehatan, pendidikan, transportasi
- * Sistem peningkatan sumber daya manusia secara nyata
- * Sistem pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan dan terarah pada penciptaan struktur ekonomi yang berkesinambungan
- * Sistem keamanan masyarakat dengan adanya polisi wilayah yang berkedudukan di bawah Gubernur.

Kalau Pemda mau mengambil hati masyarakat, ungkapan-ungkapan atau aspirasi rakyat tadi perlu terjawab dalam pengisian 'otonomi khusus' ini, hingga menjadi Undang-undang yang mengikat dan mewajibkan pemerintah pada tingkat manapun. Menetapkan sejumlah peraturan/pegangan yang berkekuatan hukum memang sangat penting karena mengingat bahwa wewenang di sejumlah bidang tetap dikhususkan bagi Pemerintah Pusat, tidak dapat dihindari bahwa perwujudan otonomi khusus nanti akan memperlihatkan kegiatan negosiasi yang berkelanjutan antara Pemda dan Pemerintah Pusat.

Lapis inti dari otonomi khusus adalah peluang untuk mengedepankan jatidiri orang Papua yang selama puluhan tahun tidak diberi tempat untuk menampilkan diri apa adanya, untuk menata diri menurut gaya sendiri. Peluang ini terbuka dan tinggal dimanfaatkan. Selain segi jatidiri, peluang menciptakan kemakmuran yang terarah kepada kesejahteraan umum juga terbuka lebar. Dua unsur inilah yang tak lain merupakan nilai-nilai kemerdekaan suatu bangsa di manapun mereka hidup.

Lapis yang paling problematis adalah ruang psikologi massa. Lapis psikologi massa merupakan ruang mental yang dimiliki oleh masyarakat Papua setelah bertahun-tahun dikecewakan dan tidak dihargai sebagai warganegara apalagi sebagai manusia yang bermartabat. Psikologi massa atau ruang mental ini sudah dipenuhi rasa kecewa, takut, marah, dan sulit untuk percaya pada janji-janji hebat tanpa melihat keadaan nyata yang meski kecil tetapi merupakan tanda yang terang-benderang bahwa perubahan itu serius. Kalau mau bahwa bangsa Papua membuka diri bagi RUU Otonomi Khusus, sangat perlu diciptakan oleh aparat negara (Sipil, TNI dan Polisi) suatu iklim yang mampu mengajak masyarakat untuk percaya kembali kepada pemimpinnya. Perlu ada tanda-tanda yang nyata bahwa aparat negara di segala tingkat "bermaksud dan berniat baik semata-mata". Tanda-tanda yang dimaksud, a.l. membebaskan para pemimpin perjuangan damai, penghentian segala macam tindakan intimidasi, segala kriminalitas ditangani secara hukum, pemberantasan KKN, penanganan para pengungsi secara manusiawi. Tanpa adanya tanda-tanda demikian, siapa dapat percaya?

4. Papua, ko mau kemanakah?

Setelah mengikuti uraian singkat di atas menjadi jelas bahwa keadaan serba tidak mudah. Namun demikian ada saat sekarang yang sangat penting buat masa depan masyarakat di Papua. Mau kemanakah? Entah arah mana yang mau dituju, beberapa hal mungkin dapat menjadi bahan pertimbangan.

- * Sudah saatnya suatu kebekuan dalam kubu masing-masing (entah M entah O, entah F) dicairkan dan dihindari karena tidak menuntun kepada sebuah jalan keluar; maka terbukalah suatu jalan dialog mengenai kepentingan bersama walau dapat berbeda pendapat.
- * Sudah saatnya aspirasi-aspirasi masyarakat sebagaimana terungkap selama ini dijadikan dasar kebijaksanaan di segala tingkat kekuasaan, dan titik tolak dalam segala diskusi mengenai kebijaksanaan itu (termasuk isi Otonomi Khusus).
- * Sudah saatnya permasalahan di Papua dijadikan bagian dari suatu diskusi politik, yang terbuka pula atas suatu evaluasi mengenai peristiwa-peristiwa yang menentukan di masa yang lampau.
- * Sudah saatnya kita sama-sama tidak menginginkan terjadinya suatu tragedi kemanusiaan berdarah, hingga kekerasan oleh pihak manapun tidak dapat diterima sebagai bagian dari proses penyelesaian masalah di Papua.
- * Sudah saatnya penyelesaian permasalahan di Papua diberikan kelonggaran waktu sambil memperjuangkan perbaikan-perbaikan di tengah jalan dimana peluang untuk itu terbuka.
- * Sudah saatnya penyelesaian permasalahan di Papua disamakan dengan mengindahkan secara nyata hak-hak dasar masyarakat Papua. Sekaligus dapat disadari bahwa permasalahan ini mengandung aspek-aspek yang sangat berbeda isinya maupun penyelesaiannya; sejumlah aspek dapat ditangani melalui suatu perbaikan pelayanan pada masyarakat atau melalui peningkatan kesejahteraan sehari-hari (di bidang kebudayaan, kesehatan, pendidikan dan ekonomi), sedangkan sejumlah aspek lain hanya dapat diselesaikan melalui suatu dialog berkelanjutan yang bersifat politik.
- * Sudah saatnya supaya pelbagai proses dijalankan serentak. Berhubungan dengan keanekaragaman aspek permasalahan di Papua sulit dapat dihindari bahwa pelbagai proses perlu dijalankan serentak; apalagi perjuangan menyangkut satu aspek tidak mutlak bertabrakan dengan perjuangan akan aspek lain.

Maka suatu keterbukaan serta sikap 'kritik diri' yang jujur pada segala pihak dan di segala tingkat sangat dibutuhkan supaya semua dibantu untuk berkomunikasi sambil menunjukkan penghargaan terhadap mitra dialognya yang mungkin berbeda pendapat. Hanya untuk itu perlu suatu iklim, suatu suasana yang mendukung. Dalam iklim itu tidak ada tempat untuk kekerasan dan arogansi kekuasaan; tidak ada tempat untuk seorang dikuasai oleh yang lain; dalam iklim demikian ada ruang untuk bergerak bertahap-tahap tanpa kehilangan pegangan pada nilai-nilai yang paling dasar; dalam iklim demikian suatu bentuk penyelesaian dapat akhirnya ditemukan.

Entah bagaimanapun bentuk penyelesaian yang akhir, sementara proses ini berjalan, tanpa menunda-nunda masyarakat Papua patut diajak dengan penuh penghargaan untuk memberikan 'cap jati dirinya' pada segala perkembangan di Bumi Cendrawasih dewasa ini dan besok. Kalau memang suatu iklim diciptakan sebagaimana kami maksudkan di atas, amanlah kita untuk melangkah bersama dan memanfaatkan segala peluang yang ada untuk menyambung suara masyarakat menjadi pegangan-pegangan kebijaksanaan politik sehari-hari. Tanpa iklim itu, sekali lagi masyarakat kecil akan menjadi korban.

Jayapura, 1 Maret 2001

Oleh: Sekretariat Keadilan & Perdamaian (SKP), Keuskupan Jayapura